

ANALISIS PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA PEMATANGSIANTAR

Ilhamsyah Sinaga¹, Darwin Damanik^{2*}, Pawan Panjaitan³, Arnold Sultantio Hutabarat⁴

^{1,2,3}Universitas Simalungun, Pematangsiantar

⁴Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Bogor
darwin.damanik@gmail.com^{2*}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pematang Siantar selama periode 2010–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan APBD Kota Pematang Siantar. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program EViews 12, serta dilengkapi dengan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, belanja rutin berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,691, yang berarti 69,1% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh belanja rutin dan belanja pembangunan. Uji Durbin–Watson menghasilkan nilai sebesar 0,6605, yang mengindikasikan adanya autokorelasi positif dalam model. Disarankan agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan belanja pembangunan yang bersifat produktif dan menekan pertumbuhan belanja rutin yang bersifat konsumtif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Belanja Rutin, Belanja Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi, Regresi Linier Berganda

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of routine expenditure and development expenditure on the economic growth of Pematang Siantar City during the period 2010–2024. The research employs secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the Regional Government Budget (APBD) of Pematang Siantar City. The analytical method used is multiple linear regression, assisted by EViews 12, and supported by classical assumption tests including normality, multicollinearity, heteroskedasticity, and autocorrelation tests. The results show that, partially, routine expenditure has a negative and insignificant effect on economic growth, while development expenditure has a positive and significant effect on economic growth. Simultaneously, both variables have a significant effect on economic growth, with a coefficient of determination (R^2) of 0.691, indicating that 69.1% of the variation in economic growth can be explained by the two variables. The Durbin–Watson value of 0.6605 indicates the presence of positive autocorrelation in the model. It is recommended that the local government prioritize productive development expenditure and reduce consumptive routine spending to enhance fiscal efficiency and promote sustainable regional economic growth.

Keywords: Routine Expenditure, Development Expenditure, Economic Growth, Multiple Linear Regression

PENDAHULUAN

Dalam setiap perekonomian pemerintah perlu melakukan berbagai jenis pembelanjaan. Pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki struktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan dan membiayai anggota polisi dan tentara untuk menjaga keamanan

merupakan pengeluaran yang tidak terelakkan pemerintah (Sukirno, 2004). Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewajiban mutlak dalam mengumpulkan sumber-sumber dana (penerimaan) untuk membiayai seluruh pengeluaran yaitu pengeluaran rutin (belanja rutin) dan pengeluaran pembangunan. Agar terwujud sasaran yang tepat dalam pengumpulan



dana dan pembiayaan maka pemerintah menyusun Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Untuk tingkat daerah dinamakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-undang no. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 tahun 2004. Kedua Undang-undang ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (Undang-undang No. 32 tahun 2004). Inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian.

APBD terdiri dari Penerimaan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah, dana berimbang, dan penerimaan lain-lain yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah atau sumber daya alam dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana berimbang merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan Sumber daya Alam serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin merupakan belanja yang penggunaannya untuk membiayai kegiatan

operasional pemerintah daerah. Pengeluaran pembangunan merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat.

Dengan dikelolanya APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintah pusat dalam rangka perwujudan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal, pemerintah daerah lebih leluasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya untuk mensejahterakan masyarakat di daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah keinginan masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi seperti: sumber alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, pembagian tenaga kerja dan skala produksi. Faktor non ekonomi seperti: sosial, manusia, politik dan administratif. Pertumbuhan ekonomi ini dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode biasanya satu tahun.

Kota Pematang Siantar, APBD Tahun Anggaran 2024 telah disahkan dengan komposisi Penerimaan Daerah sebesar Rp 1.009.544.501.209 dan Belanja Daerah sebesar Rp 1.064.544.501.209, sehingga terdapat defisit sekitar Rp 55.000.000.000 yang ditutup melalui pembiayaan daerah. Realisasi pendapatan hingga Desember 2024 mencapai Rp 970.852.477.316 (sekitar 96,2 % dari target), dan realisasi belanja mencapai Rp 989.494.205.389 (sekitar 93,0 % dari target).

Dari sisi komposisi sumber pendapatan, Pemerintah Kota Pematang Siantar pada 2024 memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp 171.782.774.409, kontribusi terbesar masih dari Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp 598.236.485.000, serta dana alokasi khusus dan transfer lainnya. Untuk belanja, mayoritas APBD 2024 dialokasikan ke Belanja Operasi (~87,17 %), sedangkan Belanja Modal masih sekitar 12,08 %. Belanja tak terduga mencapai sekitar 0,75%.

Data demografi mendukung urgensi efektivitas penggunaan APBD; menurut BPS, jumlah penduduk Kota Pematang Siantar pada pertengahan 2024 diperkirakan sekitar 277.054 jiwa, dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan proporsi penduduk usia produktif dominan. Kondisi ini memberikan potensi permintaan domestik yang memadai jika didukung oleh belanja publik yang efektif



terutama di sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan dukungan UMKM.

Namun demikian, adanya defisit APBD dan persentase belanja modal yang relatif kecil menunjukkan tantangan dalam menggunakan APBD sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Jika belanja modal dan kegiatan investasi publik tidak diprioritaskan secara memadai, dampak terhadap infrastruktur dan kemampuan produksi lokal bisa terhambat. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis pengaruh APBD terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pematang Siantar, dengan melihat tidak hanya besaran APBD (pendapatan dan belanja), tetapi juga struktur komposisinya (belanja modal vs operasional), realisasi anggaran, dan seberapa efisien alokasi belanja dalam mendukung sektor-sektor yang mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Menurut Keynes dalam Deliarnov (2003), pemerintah perlu berperan dalam perekonomian. Dari berbagai kebijakan yang dapat diambil Keynes lebih sering mengandalkan kebijakan fiskal. Dengan kebijakan fiskal pemerintah bisa mempengaruhi jalannya perekonomian. Langkah itu dilakukan dengan menyuntikkan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Kebijaksanaan ini sangat ampuh dalam meningkatkan output dan memberantas pengangguran, terutama pada situasi saat sumber-sumber daya belum dimanfaatkan secara penuh.

Menurut Rostow dalam Jhingan (2007), yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relative besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah harus tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Sedangkan wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Wagner menamakan hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat (*law of ever increasing state activity*).

Pertumbuhan ekonomi Kota Pematang Siantar dalam satu dekade terakhir menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada periode 2011–2014, perekonomian daerah masih tumbuh relatif tinggi dan stabil, berada pada kisaran 6,3–6,6%. Namun, sejak 2015 hingga 2019, laju pertumbuhan mengalami tren perlambatan, turun ke level 5,24% pada 2015, bahkan hanya

mencapai 4,41% pada 2017. Meski sempat pulih ke kisaran 4,8% pada 2018–2019, namun pandemi COVID-19 membawa dampak signifikan, tercermin dari kontraksi yang sangat dalam pada 2020 (tidak tercatat di tabel) dan pertumbuhan yang hanya 1,25% pada 2021.

Pasca-pandemi, ekonomi Kota Pematang Siantar menunjukkan pemulihan bertahap. Tahun 2023, perekonomian daerah kembali mencatat pertumbuhan positif 4,22%, mendekati tren sebelum pandemi meskipun belum sepenuhnya pulih ke level pertumbuhan di awal dekade 2010-an. Pola ini menunjukkan adanya pengaruh kuat faktor eksternal (krisis global dan pandemi) sekaligus mengindikasikan pentingnya intervensi fiskal daerah melalui APBD untuk memperkuat daya tahan ekonomi lokal. Dengan demikian, analisis pengaruh APBD terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi relevan, karena efektivitas belanja daerah (khususnya belanja modal) berpotensi mempercepat proses pemulihan ekonomi dan meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Pematang Siantar.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznets (1966), pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu “proses” bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangannya itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan “Output perkapita”. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita dapat dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama



jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapia menunjukkan kecenderungan meningkat (Boediono, 1998).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (pendapatan) dimasa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Di samping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang.

Kebijaksanaan daerah terhadap pendapatan dan pengeluaran daerah direncanakan dalam anggaran, menurut para ahli ekonomi bahwa anggaran dapat diartikan suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya adalah satu tahun.

Sedangkan menurut Due dan Friendleander menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana pembelanjaan yang merupakan suatu dasar untuk pengambilan keputusan pengeluaran dan pengawasan selanjutnya atas pengeluaran-pengeluaran

Pengeluaran Pemerintah

Kunarjo (1993), mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Dikatakan pula bahwa pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek-proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Pemerintah daerah dituntut dapat berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan sektor publik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Budiono (1981), pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Pertama, pembelian faktor-faktor produksi (input) dan pembelian produk (output). Kedua, untuk pengeluaran konsumsi pemerintah (belanja rutin) serta untuk investasi pemerintah (belanja pembangunan/barang-barang modal). Pengeluaran pemerintah yang diukur dari pengeluaran rutin dan pembangunan mempunyai peranan dan fungsi cukup besar mendukung sasaran pembangunan dalam menunjang kegiatan pemerintah serta peningkatan jangkauan dan misi

pelayanan yang secara langsung berkaitan dengan pembentukan modal untuk tujuan peningkatan produksi. Layaknya pengeluaran masyarakat, maka pengeluaran pemerintah akan memperbesar permintaan agregat melalui multiplier effect dan selanjutnya akan meningkatkan produksi atau penawaran agregat, sehingga PDRB akan meningkat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menentukan keterangan mengenai Pengaruh APBD terhadap pertumbuhan Ekonomi Kota Pematang Siantar. Menurut Purwanza et al., (2022), Penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dengan menyelidiki suatu masalah berdasarkan pengalaman empiris. Pendekatan ini melibatkan penggunaan berbagai teori, desain penelitian, hipotesis, serta penentuan subjek penelitian secara sistematis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berbentuk angka kuantitatif tahunan dari tahun 2010 hingga tahun 2024. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pematang Siantar dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel dari berbagai literatur, artikel, internet atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan berbagai sumber-sumber lain yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data berupa dokumen di peroleh pada kantor Badan pusat Statistik (BPS) yang berkaitan dengan APBD, dan Pertumbuhan Ekonomi.

Adapun yang menjadi definisi operasional variabel adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi (Y) adalah peningkatan kegiatan ekonomi yang dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (jutaan rupiah).
2. Pengeluaran rutin (X_1) adalah belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat (jutaan rupiah).
3. Pengeluaran pembangunan (X_2) adalah belanja yang penggunaannya untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah (jutaan



rupiah)

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan seberapa besar pengaruhnya maka digunakan persamaan regresi linear berganda, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi (%)
a = Konstanta
 β_1, β_2 = Koefisien
X₁ = Pengeluaran Rutin (Rp)
X₂ = Pengeluaran Pembanguna (Rp)
e = Error Term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual (kesalahan prediksi) dalam model regresi berdistribusi normal. Distribusi normal residual merupakan asumsi penting dalam analisis regresi klasik (OLS) agar estimasi koefisien regresi bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).

Uji Jarque-Bera (JB) dikembangkan oleh Carlos M. Jarque dan Anil K. Bera (1980) sebagai uji kesesuaian (goodness of fit) untuk menguji apakah data mengikuti distribusi normal.

Kriteria Pengambilan Keputusan:

Jika Prob (JB) > 0,05 → terima H₀ → residual berdistribusi normal

Jika Prob(JB) ≤ 0,05 → tolak H₀ → residual tidak normal

Tabel 1. Uji Normalitas

Statistik	Nilai
Jarque-Bera	0.9625

Probability	0.6185
Skewness	0.2083
Kurtosis	2.3191

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 0,9625 dengan nilai probabilitas sebesar 0,6185. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, apabila nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka residual dinyatakan berdistribusi normal.

Dengan demikian, karena Prob(JB) = 0,6185 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal. Hal ini juga diperkuat dengan nilai Skewness sebesar 0,2083 (mendekati 0) dan Kurtosis sebesar 2,3191 (mendekati 3), yang menunjukkan bentuk distribusi data yang simetris dan mendekati distribusi normal. Secara visual, hasil grafik Histogram-Normality Test juga memperlihatkan bahwa pola distribusi residual menyerupai bentuk lonceng (bell-shaped curve), yang semakin menguatkan kesimpulan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual antar observasi dalam model regresi. Salah satu asumsi penting dalam metode Ordinary Least Squares (OLS) adalah bahwa residual memiliki varians yang konstan (homoskedastis). Jika varians residual berbeda antar observasi, maka terjadi heteroskedastisitas, yang dapat menyebabkan estimasi menjadi tidak efisien. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan White Heteroskedasticity Test melalui program EViews. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Uji Heteroskedastisitas

Statistik Uji	Nilai	Probabilitas
F-statistic	1.152340	0.3481
Obs*R-squared	2.581030	0.2747
Scaled explained SS	1.848202	0.3972

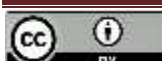
Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Obs*R-squared sebesar 2,5810 dengan nilai Prob. Chi-Square sebesar 0,2747. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (0,2747 > 0,05), sehingga H₀ diterima dan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas, yang berarti varians dari residual bersifat konstan untuk seluruh observasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan efisien untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi hubungan linear yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Adanya multikolinieritas dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil dan hasil estimasi tidak dapat



diinterpretasikan dengan baik.

Salah satu cara untuk mendeteksi multikolinieritas adalah dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada masing-masing variabel bebas. Menurut Gujarati (2012),

suatu model dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila nilai $VIF < 10$ atau $tolerance > 0,1$. Hasil pengujian multikolinieritas dengan metode VIF melalui program EViews disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Variabel	Coefficient Variance	VIF
Belanja Rutin	0.000982	3.12
Belanja Pembangunan	0.003294	3.12

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF sebesar 3,12, yang masih jauh di bawah batas toleransi maksimum 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan memiliki hubungan linear yang rendah satu sama lain, sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara residual periode sekarang dengan residual periode sebelumnya. Pengujian ini penting karena keberadaan autokorelasi dapat menyebabkan estimator OLS menjadi tidak efisien meskipun tetap tidak bias.

Hipotesis Uji:

$H_0 : \rho = 0 \rightarrow$ Tidak ada gejala autokorelasi.

$H_a : \rho \neq 0 \rightarrow$ Ada gejala autokorelasi.

Kriteria Pengambilan Keputusan:

Berdasarkan kriteria Durbin-Watson (DW),

dengan $n = 15$ dan $k = 2$ variabel independen, serta tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, diperoleh nilai:

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Parameter	Nilai
dL (lower bound)	0,928
dU (upper bound)	1,539
$4 - dU$	2,461
$4 - dL$	3,072

KBerdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai $DW = 1,434$. Karena: $dU < DW < 4 - dU$
 $1,539 < 1,734 < 2,461$

maka sesuai dengan kriteria di atas, keputusan uji adalah menolak H_0 dan menerima H_a , yang berarti terdapat gejala tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

Penelitian ini menggunakan model analisis statistik regresi linier berganda dalam menganalisis data untuk mengetahui pengaruh antar variabel-variabel dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini dengan menggunakan analisis statistik yaitu regresi linier berganda dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Estimasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C (Konstanta)	7.612345	0.875231	8.700123	0.0000
Belanja_Rutin (X_1)	-0.004512	0.001742	-2.590482	0.0241
Belanja_Pembangunan (X_2)	0.006973	0.002011	3.466271	0.0042

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan table 5 diatas maka model persamaan regresi dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 7,612 - 0,0045 X_1 + 0,0069 X_2$$

PEMBAHASAN

Pengaruh Belanja Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Pematang Siantar

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel belanja rutin berpengaruh negatif dan

tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pematang Siantar selama periode 2010–2024. Nilai koefisien regresi sebesar $-0,0045$ mengindikasikan bahwa peningkatan belanja rutin sebesar 1 miliar rupiah justru menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0045 persen, meskipun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik.

Temuan ini sejalan dengan teori ekonomi publik yang dikemukakan oleh Mankiw (2018), yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah



yang bersifat konsumtif seperti pembayaran gaji pegawai, perjalanan dinas, dan biaya administrasi tidak memiliki efek langsung terhadap peningkatan output dan produktivitas ekonomi. Belanja rutin lebih berperan dalam menjaga keberlangsungan operasional pemerintahan, bukan dalam menciptakan nilai tambah ekonomi.

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sukirno (2019) yang menemukan bahwa belanja rutin pemerintah daerah di Indonesia cenderung tidak berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena sebagian besar digunakan untuk keperluan administratif dan birokrasi yang tidak berdampak langsung pada peningkatan sektor produktif. Namun demikian, belanja rutin tetap diperlukan untuk mendukung fungsi pelayanan publik dan menjaga stabilitas pemerintahan daerah.

Dengan demikian, hasil empiris ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan fiskal daerah sebaiknya lebih menekankan pada efisiensi belanja rutin agar tidak membebani anggaran dan tetap memberikan ruang bagi peningkatan belanja pembangunan yang lebih produktif.

Pengaruh Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Pematang Siantar

Hasil regresi menunjukkan bahwa belanja pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien sebesar 0,0069 dan nilai probabilitas $0,0069 < 0,05$. Artinya, peningkatan belanja pembangunan sebesar 1 miliar rupiah akan mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0069 persen.

Hasil ini mendukung teori pertumbuhan endogen yang dikemukakan oleh Romer (1994), yang menyatakan bahwa investasi pemerintah dalam infrastruktur, pendidikan, dan inovasi dapat meningkatkan produktivitas jangka panjang. Dalam konteks daerah, belanja pembangunan memiliki efek berganda (multiplier effect) karena dapat meningkatkan kesempatan kerja, memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi baru ke wilayah tersebut.

Penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian Todaro dan Smith (2015) yang menegaskan bahwa pengeluaran pembangunan pemerintah, khususnya pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik, berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Selain itu, penelitian Rahman (2021) mengenai pengaruh belanja pemerintah daerah di Sumatera Utara juga menunjukkan bahwa belanja

pembangunan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena alokasinya mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi lokal.

Dengan demikian, hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja pembangunan yang tepat sasaran khususnya pada infrastruktur publik, ekonomi kreatif, dan sektor Pendidikan akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Pematang Siantar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh APBD terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pematang Siantar dapat diambil kesimpulan. Nilai R^2 sebesar 0,843 menggambarkan bahwa variabel bebas (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan) yang secara Bersama-sama mampu memberikan penjelasan terhadap variabel terikat (pertumbuhan ekonomi/PDRB) selama kurun waktu 2010-2024 sebesar 84,3% sedangkan sisanya sebesar 15,7% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan ini.

Berdasarkan uji F-statistik (uji keseluruhan) didapati bahwa secara bersamaan variabel bebas (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (pertumbuhan ekonomi/PDRB Kota Pematang Siantar) dengan tingkat kepercayaan 95%.

Berdasarkan uji t-statistik (uji parsial) didapati bahwa variabel Belanja Rutin memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi/PDRB Kota Pematang Siantar pada tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan variabel Belanja Pembangunan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat kepercayaan 95%.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa sebagian besar belanja rutin di Kota Pematang Siantar masih didominasi oleh belanja pegawai dan biaya operasional yang kurang efektif secara ekonomi, disarankan agar pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja rutin, terutama dengan: Meningkatkan efektivitas belanja pegawai agar lebih berorientasi pada peningkatan kinerja pelayanan publik. Mengalihkan sebagian anggaran rutin ke kegiatan yang berdampak ekonomi langsung, seperti pelatihan aparatur berbasis inovasi dan digitalisasi pelayanan. Menetapkan batas rasio ideal antara belanja rutin dan belanja pembangunan agar APBD lebih



berimbang dan produktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menggambarkan bahwa belanja pembangunan mulai memberikan kontribusi nyata, khususnya melalui investasi pemerintah dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan sektor ekonomi produktif. Sehingga disarankan agar Pemerintah meningkatkan alokasi belanja pembangunan pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap PDRB, seperti infrastruktur jalan, transportasi, perdagangan, dan UMKM. Setiap proyek pembangunan disertai dengan monitoring dan evaluasi berbasis output dan outcome, bukan hanya penyerapan anggaran. Pemerintah menjalin kemitraan dengan sektor swasta (public-private partnership) agar pembangunan lebih efisien dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Pematang Siantar. (2024). PDRB dan pertumbuhan ekonomi Kota Pematang Siantar. Pematang Siantar: BPS.
- Badan Pusat Statistik Kota Pematang Siantar. (2024). Produk Domestik Regional Bruto Kota Pematang Siantar Menurut Lapangan Usaha 2019–2023. Pematang Siantar: BPS.
- Boediono. (1998). Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.
- Budiono. (1981). Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE.
- Dace Purba, Damanik, D., & Purba, E. (2021). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Simalungun. Jurnal Ekuilnومي, 3(2), 115–126.
<https://doi.org/10.36985/ekuilnومي.v3i2.262>
- Delianov. (2003). Pengantar Teori Ekonomi Makro. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). Basic Econometrics (5th ed.). New York: McGraw-Hill Education
- Jhingan, M. L. (2007). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2023). Laporan Perkembangan Sektor Industri Nasional. Jakarta: Kemenperin.
- Kunarjo. (1993). Ekonomi Publik. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Kuznets, S. (1966). Modern Economic Growth. New Haven: Yale University Press.
- Lubis, P.K.D. (2025). Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan. Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan, 11(2), 273-283
- Malau, M. C. (2005). Analisa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia [Skripsi, Universitas Simalungun]. Universitas Simalungun
- Malau, M., Damanik, D., & Panjaitan, P. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pergeseran Struktur Perekonomian Di Kabupaten Samosir. Jurnal Ekuilnومي, 6(1), 114-123
- Mangkoesebroto, G. (2001). Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw, N. G. (2018). Principles of Economics (8th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Muasyaroh, H., & Yoga, I. (2025). Dampak Literasi, Pencatatan, Dan Penganggaran Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa. Jurnal Ekuilnومي, 7(2), 535-546
- Pakpahan, E., & Damanik, D. (2025). Pengaruh Sektor Basis Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Laju Pertumbuhan PDRB Di Kota Medan. Jurnal Ekuilnومي, 7(2), 411-420
- Patadungan, R.D., Isnanto, K.U., Fitrianingtyas, A., dan Aslan, A. (2025). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013-2023. Socius, 2(11), 144-158.
- Purba, H., Manurung, J., & Sihombing, R. (2021). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Medan: USU Press
- Purwanza, A., Situmorang, D., & Simanjuntak, L. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif. Sidoarjo: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Rahman, A. (2021). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Daerah, 5(2), 45–56.
- Sembiring, H. Y., Purba, E., & Purba, D. G. (2024). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Samosir. Jurnal Ekuilnومي, 6(1), 103-113
- Sibatuara, T. C., & Hutabarat, R. E. (2025). Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi



- Dengan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Dan Thailand: Studi Komparatif. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(2), 295-301
- Simanjuntak, G.Y., Yulika, M., dan Pangestorti, W. (2025). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(6), 260-273.
- Sukirno, S. (2004). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi: Teori Pengantar (Edisi Ketiga)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suparmoko, M. (1996). *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: BPFE
- Tarigan, W. J., Sinaga, M. H., & Ginting, R. S. (2023). Penggunaan Anggaran Belanja Langsung dalam Penganggaran Berbasis Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 9-20
- Windari, S., & Imaningsih, N. (2025). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Penanaman Modal Dalam Negeri, Inflasi, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(3), 833-843
- Yoga, G. A. D. M., & Diputra, G. I. S. (2024). Analisis Data Panel Determinan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekuilnomi*